

PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP EFEKTIFITAS OTONOMI DESA

Aji Priambodo
Universitas Perwira Purbalingga
ajipriambodo@unperba.ac.id

ABSTRAK

Masalah yang ditemukan Masih banyak pembangunan yang tidak dapat terlaksana, sehingga tidak dapat dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat, contoh pembangunan prasarana umum seperti sarana transportasi desa, yang membutuhkan pengaspalan, yang belum direalisasikan, sarana keagamaan atau tempat ibadah, serta sarana umum lainnya. Belum terciptanya pelayanan pemerintahan desa yang baik dalam arti yang memberikan pelayanan publik, pemberdayaan kepada masyarakat secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksplanasi (*Explanatory Research*). Penelitian ini dilaksanakan di Di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data menggunakan angket yang dibagikan kepada 94 pegawai. Teknik analisa data menggunakan analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja pemerintah desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga termasuk kategori cukup. Kerjasama aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sudah cukup baik karena selalu mengedepankan musyawarah dan memberikan informasi. Efektifitas otonomi desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga termasuk kategori cukup. Terdapat pengaruh Kinerja pemerintah desa terhadap efektifitas otonomi desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Artinya jika pemerintahan desa Bobotsari memiliki kinerja baik maka akan tercipt efektifitas otomnomi desa.

Kata Kunci : Kinerja, Efektifitas, Otonomi, Desa

PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia menghadapi berbagai bidang kehidupan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah dituntut untuk lebih dapat memberikan pelayanan terbaik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pemerintah yang baik yang dapat memberikan perubahan kearah kemajuan kepada seluruh rakyatnya. Daerah pembangunannya diarahkan untuk memacu pemerataan hasil-hasil pembangunan dan hasilnya dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain daripada itu tujuan dapat dicapai dengan baik, maka tidak terlepas dari peranan manusia sebagai anggota masyarakat itu sendiri selaku pelaksana pembangunan. Berdasarkan aturan tersebut maka desentralisasi dan otonomi daerah yang dewasa ini sudah bergulir diharapkan terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak.

Penyelenggara otonomi daerah, perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menggali, dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan, serta diarahkan untuk pemacu pemerataan pembangunan, dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerah secara optimal.

Tujuan pembangunan di daerah melalui asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan di daerah secara menyeluruh dapat segera dicapai, maka tidak lepas dari peran manusianya itu sendiri selaku pelaksana pembangunan. Selain itu sebagai individu atau kelompok masyarakat harus mampu menghormati, menghargai, dan patuh terhadap aturan, yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan semangat persatuan dan kesatuan kebangsaan yang berdaulat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa : “otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian otonomi daerah merupakan cara bagaimana merefleksikan kewenangan dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Pemerintahan desa merupakan salah satu jenjang birokrasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, tentunya berkewajiban untuk mengimplementasikan program-program pembangunan. Sukses dan tidaknya program itu tergantung pada kinerja aparat pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kepala Desa dalam kapasitasnya tersebut diharapkan dapat melaksanakan berbagai kebijakan baik yang berasal dari pimpinan dan kepemimpinannya (kebijakan struktural) ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis di tingkat desa. Keberhasilan kepala desa dalam mengimplementasikan segala kebijakan yang ada merupakan salah satu indikator bahwa peran-peran birokrasi di desa telah berjalan, tentunya pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Idealnya seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukannya dalam hierarki kepemimpinan organisasi, maka semakin banyak pula tuntutan untuk berfikir dan bertindak secara generalis. Disamping itu didukung dengan perangkat pemerintahan desa yang ada di daerah secara umum mempunyai tugas untuk melaksanakan segala usaha dan memperlancar penyelenggaraan di bidang pemerintahan, juga harus mampu melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa

tanggungjawab, serta mampu berperan sebagai mana mestinya, demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Ditinjau dari aturan pemerintahan desa, kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, harus senantiasa berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki yang mendukung tercapainya penyelenggaraan otonomi desa di daerahnya. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Pengakuan terhadap pemerintah desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menunjukkan sebagai perwujudan otonomi desa. Hal ini berarti warga masyarakat desa yang bersangkutan diberi wewenang memiliki lembaga perwakilan yang berfungsi menyampaikan aspirasi mereka disamping pemerintahan desa.

Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period. Sedarmayanti (2010: 260) mengemukakan bahwa: Kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula. Sedarmayanti (2010: 259) juga mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) berasal dari akar kata “*to perform*” yang mempunyai beberapa pengertian: *To do or carry out execute. To discharge of fulfil as a vow. To portray, as character in a play. To tender by the voice or musikal instrument. To execute or complete an undertaking. To act a part in a play. To perform musik. To do what is expected of a person or machine.* Artinya: Melakukan, menjalankan, melaksanakan.

Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar. Menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan. Menggambarkannya dengan suara atau alat musik. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan. Memainkan (pertunjukan) musik. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Kinerja merupakan kemampuan atau kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan yang diambil. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat seberapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalannya dalam menjalankan amanah yang diterimanya. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah hal yang sangat diutamakan dalam sebuah organisasi pelayanan publik. Karena kinerja merupakan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula yang suda direncanakan ataupun suda ditargetkan. Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai produk atau hasil kerja seseorang melalui proses/kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan akuntabilitas yang tinggi sehingga mencapai hasil yang optimal dalam bentuk kreatifitas sebagai hasil dari prestasi kerjanya. Dengan demikian maka kinerja seseorang dalam bekerja, proses atau kegiatan yang dilakukan serta produk atau hasil yang dicapainya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedarmayanti (2010:198), Indikator kinerja adalah : Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (Keberhasilan/ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan, dan pada akhirnya kinerja organisasi/unit kerja pelaksanaannya. Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut : (a) Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan kegiatan dilaksanakan (b) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama melaksanakan kebijakan /

program / kegiatan dan dalam menilai kinerjanya (c) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para pegawai negeri sipil sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering para pegawai tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi dalam suatu instansi pemerintahan menghadapi krisis yang serius.

Dwiyanto (2008: 50-51) dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyebutkan Indikator Kinerja menurut adalah sebagai berikut:

- a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*.
- b. Kualitas Layanan
Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik.
- c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

2.2. Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (2007:12) menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

2.3. Efektifitas

Steers (2006: 87) mengemukakan bahwa: Efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dari pendapat di atas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah

salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Unsur-unsur efektifitas *Steers (2006: 4)* yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi:

- a. *Input*, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang, energy, orang dan benda
- b. *Throughput*, yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi output
- c. *Ouput*, yaitu hail yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang (fisik), maupun jasa (pelayanan).

Menurut Moenir, dkk (2004: 34), unsur-unsur efektifitas meliputi:

1. *Input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi, pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
2. *Conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
3. *Output* (keluaran) yaitu: pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka konteks penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas otonomi desa yang menggunakan perspektif sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *Input* (masukan), *throughput*, *output* (keluaran).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi yaitu Penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan metode yang digunakan adalah metode asosiatif (hubungan) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat desa yang ada di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan data tahun 2015 sebanyak 1478 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara acak sederhana yaitu setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel yaitu 94 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Variabel Kinerja

Indikator	NO	Pertanyaan	Skor Kumulatif	%	Kategori	Rata-rata Indikator
Produktivitas	1	Pegawai desa mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.	191	75	Cukup	75
	2	Pegawai desa mampu mengenali kebutuhan masyarakat.	194	76	Baik	76
Responsivitas	3	Pegawai desa dapat menyusun agenda dan prioritas pelayanan	179	70	Cukup	71% (Cukup)
	4	Pegawai desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	167	65	Cukup	
	5	Pegawai desa mampu mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat	170	67	Cukup	
	6	Pegawai desa memberikan pelayanan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar	170	67	Cukup	
Responsibilitas	7	Pegawai desa memberikan pelayanan sesuai kebijakan kepala desa secara tertulis	175	69	Cukup	68% (Cukup)
	8	Pegawai desa memberikan pelayanan sesuai kebijakan kepala desa secara tidak tertulis	176	69	Cukup	
	9	Pegawai desa memberikan pelayanan sesuai perintah kepala desa	170	67	Cukup	
Akuntabilitas (keluaran)	10	Pegawai desa tunduk dan taat kepada kepala desa	175	69	Cukup	68% (Cukup)
	11	Pegawai desa mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.	176	69	Cukup	
Jumlah			1943			
Rata-Rata			96	69	Cukup	

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas didapat skor rata-rata secara keseluruhan sebesar 96 atau dengan persentase 69% yang berada pada kategori cukup, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai termasuk cukup.

Variabel efektifitas

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang peneliti lakukan mengenai *efektifitas* (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Uraian Pernyataan	Skor yang Dicapai	%	Kriteria
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Dalam pelayanan kepada masyarakat, terdapat petugas yang khusus menanganinya.	370	74%	Cukup
2	Masyarakat diberi informasi tentang pelayanan di desa.	371	74%	Cukup
3	Masyarakat diberi penyuluhan tentang cara pengajuan permohonan .	356	71%	Cukup
4	Masyarakat diberi kemudahan dalam bantuan pelayanan.	333	67%	Cukup
5	Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai yang diajukan.	328	66%	Cukup
6	Masyarakat patuh terhadap ketentuan pelayanan yang disediakan.	344	69%	Cukup
7	Tatacara pelayanan mudah dipahami.	339	68%	Cukup
8	Dalam pelayanan kepada masyarakat sudah menggunakan komputer	328	66%	Cukup
Jumlah		3452		
Rata-rata		313	63%	Cukup

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas didapat skor rata-rata secara keseluruhan sebesar 313 atau dengan persentasi 63% yang berada pada kategori cukup.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Efektifitas Otonomi Desa

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai korelasi sebesar 0,63 termasuk pada kategori kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan maka pengaruh kinerja sebesar 39,69%, sisanya sebanyak 60,31% yaitu situasi atau keadaan yang berada di luar cakupan penelitian seperti motivasi, pelayanan, dan disiplin.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Pemberian 2 otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam 3 memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan, PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam pelaksanaan tugastugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap efektifitas otonomi desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga termasuk kategori cukup. Kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sudah cukup baik karena selalu mengedepankan musyawarah dan memberikan informasi kepada rekan kerjanya yang lain jika pekerjaan tersebut dirasa perlu membutuhkan rekan kerjanya baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Staf agar pekerjaan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan pekerjaan yang dimaksud misalnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, administrasi kantor, pembangunan, pemerintahan, dan lain sebagainya.

2. Efektifitas otonomi desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga termasuk kategori cukup. Kerjasama dari aparatur merupakan wujud dari kepedulian masing-masing aparatur kepada sesama rekan kerjanya sebagai penunjang agar pekerjaan yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Terdapat pengaruh Kinerja pemerintah desa terhadap efektifitas otonomi desa di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Artinya jika pemerintahan desa Bobotsari memiliki kinerja baik maka akan tercapat efektifitas otonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman. Muhidin, Sambas Ali. Somantri, Ating. 2007. *Dasar-. Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung, 2007
- Dwiyanto, A., Dkk, (2008) *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Hari., Sabarno MBA., M.M. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Juliantara Dadang, 2004, *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif, Pembaruan*, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Rivai 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi*
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Taliziduhu Ndraha 2007. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.